



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 242 /Bua /OT.01.3 /08 /2016
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permintaan Rencana Kebutuhan BMN TA 2018

30 Agustus 2016

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan.

di

tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-623/KN/2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Jadwal Penyampaian RKBMN, PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, KMK Nomor 127/KM.6/2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKBMN pada Kementerian/Lembaga dan KMK Nomor 174/2016 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 450/PMK.06/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan hal tersebut di atas perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan penyeragaman penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sebagai berikut:

1. RKBMN adalah Rencana Kebutuhan terkait Barang Milik Negara yang merupakan dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 1 (satu) tahun, yang berisi usulan belanja barang pemeliharaan dan belanja modal (tanah, gedung/bangunan, kendaraan dan aset lainnya dengan nilai diatas 100 juta). RKBMN ini disusun menggunakan aplikasi SIMAN sebagai turunan dari aplikasi SIMAK BMN hasil rekonsiliasi Semester 1 (satu) TA 2016.
2. Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung bagi Pengadilan dibawahnya berfungsi sebagai verifikator dan penanggungjawab dalam penyampaian usulan ADK RKBMN TA 2018.
3. Satuan Kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama wajib melakukan input data melalui migrasi dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SIMAN dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir.

4. RKBMN harus diusulkan **melalui Tingkat Banding**, apabila tidak melalui mekanisme tersebut maka **dianggap tidak mengusulkan**.
5. Mengingat batas waktu penyerahan ADK RKBMN TA 2018 sudah sangat mendesak, maka Pengadilan Tingkat Banding wajib mengirimkan kompilasi data ADK tersebut **paling lambat tanggal 20 September 2016 melalui aplikasi SIMAN** sesuai *Time Schedule* terlampir.
6. Hal-hal yang belum diatur akan dijelaskan secara rinci dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. DRS. H. ACOT NUR, M.H.
NIP. 19630403198903 1 021



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial
2. Kepala Badan Urusan Administrasi
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
4. Kepala Biro Perlengkapan